

**PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS



Ferry Jeremia Harahap

No. Mhs : 125201804/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Sumatera Barat



Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 April 2014

Tempat : Gedung Bona Ventura Kampus Magister Ilmu Hukum

Susunan Tim Penguji :

1. Dosen Pembimbing I : Dr. Th. Anita Christiani., SH., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing II : Sri Pudyamoko., SH., M.Hum.
3. Dosen Penguji : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M. Hum.

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Mengesahkan

Dekan Magister Ilmu Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. E. Sundari., SH., M. Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Ynag Majah Esa, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulisan tesis yang berjudul Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Peniongkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Sumatera Barat, dapat diselesaikan. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh stui pada Program Prascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pelajaran yang dapat penulis ambil. Bagaiamana dibutuhkan sebuah proses pendewasaan baik dari segi perilaku, sikap, cara bepikir, dan melatih tingkat kesabaran dalam menghadapi apapun. Penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat diselesaikan karena penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, juga pihak lainnya yang memberikan bantuan baik dari segi moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. R. Maryanto., MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sundari, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu

pada Program Magister ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Th. Anita Christiani., Sh., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis, penulis sangat berterima kasih atas masukan – masukan serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Y. Sri Pudyatmoko., S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis, penulis sangat berterima kasih atas masukan – masukan serta arahan kepada penulis.
5. Semua dosen dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kerelaan hati Bapak / Ibu dosen untuk mendidik penulis dengan sejumlah pengetahuan hukum, serta ucapan terima kasih juga kepada karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan – pelayanan yang bersifat administratif.
6. Bapak Ollyandes, S.E., selaku kepala bidang kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, yang telah memberikan informasi serta data – data mengenai penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
7. Bapak Razali Syarif, S.E., M.M., selaku kepala bidang kebijakan hukum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang telah memberikan informasi serta data –data mengenai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
8. Semua Rekan – Rekan Mahasiswa Pasca sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum (angkatan bulan September tahun 2012) terimakasih atas kebersamaan dan nilai – nilai pertemanan yang diberikan.

9. Bapak Dr. Nils Wagenknecht, Ibu Villa Wagenknecht, Ibu Jenny Wilcoxen, Dunja, Jonas, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
10. Kedua Orangtua yang juga memotivasi kepada penulis sewaktu masih aktif kuliah.

Penulis menyadari bahwa tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh sebab itu kritik dan saran semua pihak yang dapat membacanya dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dapat dikirim melalui email : ferryjeremia@yahoo.com. Akhir kata Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin

Yogyakarta, April 2014

Penulis,

Ferry Jeremia Harahap.

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Pendelegasian Kementrian dan Kapolri kepada BKPM.....	74
2. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 – 2012.....	92
3. Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing Tahun 2009 – November 2013.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Lampiran 2 Data Realisasi Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTI SARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Keaslian Penelitian.....	12
4. Manfaat Penelitian.....	16
B. Tujuan Penelitian.....	16
C. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Yuridis Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.....	18
B. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	30
C. Landasan Teori.....	32
1. Teori Ekonomi.....	32
2. Teori Investasi.....	33
3. Teori Tata kelola pemerintahan yang baik.....	35
4. Teori Otonomi.....	37
5. Teori Pertanggung Jawaban.....	43
5. Teori Perizinan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor – Faktor Yuridis Normatif Kurangnya Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat	55
1. Kebijakan setelah berlakunya otonomi daerah	55
2. Faktor – Faktor Yuridis kurangnya penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat	66
B. Pelaksanaan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat	73
1. Tinjauan umum tugas pokok dan fungsi BKPM dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPM terhadap Investasi di Provinsi Sumatera Barat.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

INTI SARI

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat baik itu untuk lapisan masyarakat atas maupun lapisan masyarakat bawah. Pembangunan tidak dilakukan dalam satu bidang saja, tetapi dilakukan di semua bidang kehidupan baik itu yang menyentuh langsung sendi – sendi kehidupan masyarakat, maupun pembangunan yang secara tidak langsung agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita – citakan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia yang diwujudkan melalui penanaman modal di jalankan oleh lembaga pemerintah non departemen yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Guna melaksanakan kegiatan penanaman modal yang ada di daerah maka dibentuk badan koordinasi penanaman modal daerah. Peran badan koordinasi penanaman modal daerah diharapkan dapat memperlancar kegiatan penanaman modal di daerah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung. Ditemukan peraturan yang antinomi yang menghambat investasi di Provinsi Sumatera Barat terkait tanah ulayat yang digunakan dalam kegiatan investasi. Maka kedepanya diperlukan kebijakan yang menjadi jalan keluar permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Peran, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The purpose of Development is to upgrade the living quality if all society, yet upper class and lower class society. The development is not only in one sector, but perform in all sector of living that directly effect the life of society and undirectly as well so it may increase the way of living and welfare society like on the opening of Indonesia basic laws 1945 goals.

Development on economic sector in Indonesia manifest by invesment that run by non departement institution government institution called as investment coordinating board. In order to improve the invesment in wide area so investment coordinating board area was formed. The role of investment coordinating board area is expect to ease the invesment activity in province so undirectly may increase the original income area in Province of West Sumatera.

This research is using normatif method through library study and direct interview. It found an antonomi rules that immobilize investment in Province of West Sumatera due to the land of local society custom on investment activity. Wish in future there will be policy that may become the way out of the using land of local society custom problem.

Keyword : Role, Invesment coordinating board, Original income area.